

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep administrasi publik bukanlah sebuah konsep yang baru. Menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, (2013:7) administrasi publik merupakan sebuah proses untuk mengorganisir, mengkoordinasi sumber daya yang ada. Administrasi publik dalam aspek ruang lingkupnya terbagi atas beberapa hal salah satunya adalah administrasi pembangunan yang terkait dengan proses kegiatan pembangunan baik pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan ataupun fasilitas publik lainnya maupun non fisik seperti pembangunan sumber daya manusia.

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat perekonomian, perkembangan dan perubahan berbagai aktivitas seperti pendidikan, budaya, wisata dan lain sebagainya. Pada perjalanannya kota mengalami perkembangan pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial, ekonomi dan interaksi yang terjadi dengan wilayah lain. Kota juga menempati kedudukan yang strategis sehingga ini menjadi perhatian khusus untuk menata kota dan memanfaatkan wilayah kawasan terutama pada penyediaan kawasan hijau.

Secara mendasar kota juga bisa dipandang fungsinya sebagai suatu ekosistem. Menurut Ernawi dalam Effendy (2017:59) tantangan dalam mengembangkan perkotaan di Indonesia semakin berat kedepannya karena jumlah

kota di Indonesia mengalami pertumbuhan yang progresif. Perkembangan kota di Indonesia yang tumbuh secara dinamis baik dari aspek demografis, ekonomi dan fisik spasial, kawasan perkotaan di Indonesia yang terbentuk cenderung bersifat ekspansif dan menunjukkan gejala yang tidak terkendali.

Menurut Prof. Hadi S.Alikodra, dikutip dalam artikel yang berjudul “Pembangunan Kota Hijau” yang diakses melalui (<http://www.wwf.or.id/?27980%2FMenuju-Kota-Bertaraf-Ecocity>) dijelaskan bahwa kota merupakan mikrosom permasalahan lingkungan yang terus berkembang tanpa batas, mengikuti irama dan dinamika pertumbuhan penduduknya yang meningkat. Manusia berinteraksi dengan lingkungan, namun disisi lain perilaku manusia tidak menjaga lingkungan. Pada lain pihak karena keterbatasan daya serap dan daya asimilasi lingkungan, lingkungan hidup di perkotaan mengalami kerusakan dan tercemar (*ecological scarcity*).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang didalamnya mengatur mengenai Ketentuan Pelaksanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau yang mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi sebuah perkotaan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus memenuhi standar ideal 30% dengan pembagian 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas keseluruhan wilayah tersebut.

Sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan pendidikan, wisata, perdagangan dan lainnya yang secara tidak langsung akan berdampak pada penambahan jumlah penduduk dan kegiatan yang beragam. Sehingga dengan jumlah penduduk dan kegiatan yang beragam maka perlu adanya perhatian dan peningkatan terhadap fasilitas umum salah satunya adalah kawasan terbuka hijau. Menurut sensus penduduk Kota Malang tahun 2014 jumlah penduduk Kota Malang menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Kecamatan	Penduduk	Lahir		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
Kedungkandang	199.506	501	446	947
Sukun	198.241	540	478	1.018
Klojen	109.000	258	235	493
Blimbing	191.631	522	487	1.009
Lowokwaru	166.633	447	430	877
Jumlah	865.011	2.268	2.076	4.344

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2015

Kurangnya jumlah kawasan terbuka hijau ini juga diakui oleh Pemerintah Kota Malang sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pandu Zanuar salah satu staf Bagian Tata Kota Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang pemenuhan RTH publik di Kota Malang saat ini masih berkisar 12,21% sedangkan RTH private nya sudah 10% lebih.

“dari luas kota Malang 11.006 ha seharusnya RTH kota Malang bisa mencapai 20% sesuai dalam amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tetapi saat ini RTH kota Malang masih sekitar 12,21% saja dari luas daerah dan kami menyadari memang masih belum mencapai target 20% RTH publik karena banyak sekali permasalahan yang dihadapi dilapangan seperti harga lahan diperkotaan yang semakin mahal, kesadaran dari masyarakat tentang lingkungan yang masih minim dan permasalahan dengan para pengembang perumahan. Tetapi Pemerintah Malang sudah berkomitmen target 20% RTH dipenuhi pada tahun 2030 yang sudah tercantum dalam RPJP”. (Wawancara pada Jum’at, 24 Februari 2017)

Sebagaimana pada tabeldan hasil wawancara diatas maka dapat kita ketahui bahwa keberadaan RTH Kota Malang masih belum mencapai standar sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Selain itu juga di kutip dari <http://suryamalang.tribunnews.com/> tentang “Ternyata RTH Kota Malang Masih Kurang, Ini Rencana Pemkot” sebagai berikut:

“Ibu Diah (Sekretaris BAPPEDA Kota Malang) mengatakan meskipun belum memenuhi ketentuan RTH, Kota Malang cukup baik dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Pulau Jawa. Pasalnya sampai saat ini belum ada daerah yang memeuhi persentase tersebut. Untuk itu pemerintah Kota Malang akan melakukan berbagai kesiapan untuk memenuhi target RTH 20% yang menurut Perda RTRW akan mampu dipenuhi pada 2031 ” (<http://suryamalang.tribunnews.com/>, edisi 18 November 2015)

Pemerintah Kota Malang pun juga telah membuat berbagai kebijakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Permasalahan kurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak bisa kita serahkan kepada pemerintah sepenuhnya tetapi juga diperlukan kesadaran dan kepedulian dari aktor lain seperti masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena ketika pemerintah berupaya untuk menciptakan RTH tetapi kesadaran dan kepedulian lingkungan dari masyarakat kurang misalnya merusak tanaman, mencoret-coret fasilitas taman dan lain sebagainya maka tujuan untuk memenuhi RTH juga akan terkendala. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri.

Kelurahan Kedungkandang merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berinovasi dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau kawasan hijau. Inovasi Kelurahan Kedungkandang dalam menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memanfaatkan kawasan sempadan sungai yang berada di RW 3 Kelurahan Kedungkandang. Pada umumnya kawasan sempadan sungai digunakan oleh masyarakat untuk tempat menaruh pasir katel. Menurut Agus Surahman yaitu ketua RW 3 Kelurahan Kedungkandang yang dikutip dari (<http://malangkota.go.id/2016/04/18/taman-edukasi-ikon-baru-indahnyataman-dibantaran-sungai/>) membenarkan bahwa:

“dulunya kawasan sempadan sungai ini digunakan untuk urusan penempatan pasir katel, setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa timur akhirnya dimanfaatkan warga dengan dibangun Taman Edukasi.”

Pembangunan RTH atau kawasan terbuka hijau tersebut berupa sebuah taman yang melintang sepanjang 167 meter mengacu pada surat izin dari Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur Nomor . Taman tersebut merupakan hasil dari swadaya masyarakat Kelurahan Kedungkandang itu sendiri. Keberadaan taman tersebut berangkat dari kebutuhan dan harapan masyarakat Kelurahan Kedungkandang karena melihat kondisi sempadan sungai yang tidak terawat. Pada pelaksanaannya pembangunan taman tersebut dibantu dan didorong oleh lembaga masyarakat di Kelurahan Kedungkandang. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat itu sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desanya (Adisasmita, 2013:89). Melalui pengembangan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada. Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan, dan mengelola segala sumber daya alam yang ada. Bentuk swadaya masyarakat dalam pembangunan dituangkan dan dikembangkan melalui kegiatan pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaannya. Masyarakat bersama lembaga masyarakat bergotong-royong untuk membangun kawasan terbuka hijau di Kelurahan Kedungkandang. Bermodalkan dengan sumber daya manusia dan sumber dana yang terbatas perangkat daerah berhasil mendorong masyarakat membangun kawasan terbuka hijau yang berbentuk Taman. Pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi di Kelurahan Kedungkandang yang tidak lepas juga dari peran pemerintah setempat, keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat yang mendorong dan menghimpun kekuatan masyarakat untuk mengolah sumber daya alam sekitar dengan menciptakan kawasan terbuka

hijau. Kelurahan Kedungkandang ini patut menjadi salah satu contoh bahwa sebagai salah satu komponen sosial, masyarakat juga penting memiliki kesadaran dan kepedulian dengan kondisi lingkungan hidup di wilayahnya sehingga masyarakat mampu sebagai penompang tujuan sebuah kota tersebut.

Oleh Karena itu melihat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kedungkandang Kota Malang dengan memilih judul yaitu **"Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Hijau Kelurahan Kedungkandang (Studi Pada Taman Edukasi Kelurahan Kedungkandang Kota Malang)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi di Kelurahan Kedungkandang ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi Kelurahan Kedungkandang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi di Kelurahan Kedungkandang

2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi Kelurahan Kedungkandang

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan kontribusi akademi dengan menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan terkait dengan pembangunan RTH
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti lain sebagai bahan pembandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian lanjutan
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengetahui konsep dan permasalahan RTH dan mampu menarik teori yang berkaitan dengan pembangunan RTH yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - b. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menciptakan RTH

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang, rumusan masalah mencakup tentang batasan-batasan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian mencakup jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Sistematika pembahasan berisi tentang pematatan dari masing-masing bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep atau temuan ilmiah dari buku yang berkaitan dengan tema penelitian tentang administrasi pembangunan, pembangunan, ruang lingkup pembangunan, pelaksanaan, pemerintah daerah dan kawasan hijau.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum kondisi penelitian, hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan membandingkan antara teori dan fakta yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran